



Pelaporan Kinerja Holistik Program Kampung Nelayan Maju di Kelurahan Oesapa Melalui Dinas Perikanan Kota Kupang untuk Berkontribusi terhadap *Blue Economy*

Natasya Pintaui Hendrikas Manu^{1*}, Moni Wehelmina Muskanan², Indah Mutiara³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: natasyaphmanu@gmail.com¹, moni.muskanan@staf.undana.ac.id², indah.mutiara@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: natasyaphmanu@gmail.com

Abstract: *The Kampung Nelayan Maju (Kalaju) Program is an initiative by Indonesia's Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) to enhance the productivity of coastal communities through sustainable village development. This study holistically examines the Kalaju program cycle in Oesapa Subdistrict, Kupang City, encompassing the planning, implementation, performance measurement (accounting), and reporting stages, applying the Sustainability Accounting and Reporting (SAR) Framework developed by Schaltegger and Wagner (2006). Using a qualitative case study and content analysis approach, data were collected through in-depth interviews and documentation from key stakeholders. The findings reveal that while the involvement of the Department of Fisheries, local government, and community groups (Pokmas) is evident, the reporting system is not yet optimal to comprehensively capture the program's social, economic, and environmental impacts. Reporting remains largely output-based and lacks integration with outcome-oriented indicators. Therefore, it is highly recommended to integrate the SAR Framework into the technical design of the program at the national level, thereby embedding sustainability principles and enhancing the accountability and effectiveness of regional stakeholders in implementing and reporting program outcomes.*

Keywords: *Blue Economy; Kampung Nelayan Maju; Performance Reporting; SAR Framework; Sustainability.*

Abstrak: Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan mendorong produktivitas masyarakat pesisir melalui penataan kampung nelayan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara holistik siklus program Kalaju di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, mencakup tahap perencanaan (*planning*), implementasi dan pengukuran kinerja (*accounting*), serta pelaporan (*reporting*), dengan menggunakan pendekatan *Sustainability Accounting and Reporting (SAR) Framework* dari Schaltegger dan Wagner (2006). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan *content analysis*, melalui wawancara mendalam serta dokumentasi terhadap aktor kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan Dinas Perikanan, Pemerintah Kelurahan, dan Pokmas cukup signifikan, namun pelaksanaan Kalaju di Oesapa belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelaporan yang mencerminkan kinerja berkelanjutan. Pelaporan masih bersifat output-based, belum mengungkap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Perbaikan sistem dari tingkat pusat diperlukan agar prinsip keberlanjutan terintegrasi dalam kebijakan teknis, sehingga pemangku kepentingan di daerah dapat menjalankan perannya secara optimal.

Kata Kunci: *Blue Economy; Kampung Nelayan Maju; Keberlanjutan; Pelaporan Kinerja; SAR Framework.*

1. PENDAHULUAN

Blue Economy atau ekonomi biru telah berkembang menjadi strategi nasional Indonesia dalam menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks di wilayah pesisir (Chandra dkk., 2021). Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pelestarian ekosistem laut, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini termarginalkan (Midlen, 2021). Komitmen negara terhadap ekonomi biru tercermin dalam berbagai kebijakan strategis, seperti pengesahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, penyusunan Blue Economy Roadmap oleh Kementerian PPN/Bappenas, serta penetapan program prioritas Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, inovatif, dan inklusif (Nasir dkk., 2024).

Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) muncul sebagai salah satu inisiatif unggulan yang ditujukan untuk mentransformasi kampung nelayan menjadi kawasan yang bersih, tertata, maju, dan sehat. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, Kalaju diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan, memperkuat pengelolaan perikanan berbasis keberlanjutan, serta membangun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat terhadap risiko perubahan iklim (Grahadyarini, 2023; Syahputra, 2023). Program ini dilaksanakan melalui skema bantuan pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari KKP di tingkat nasional, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah kelurahan sebagai pelaksana lokal, hingga masyarakat nelayan sebagai penerima manfaat langsung (KKP, 2021). Pola kolaboratif ini diharapkan menjadi motor penggerak transformasi kampung nelayan secara lebih inklusif dan partisipatif.

Meskipun Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dirancang untuk mendorong pembangunan kawasan pesisir secara terpadu, implementasinya belum menunjukkan hasil yang optimal di beberapa lokasi. Hal ini tercermin dari kondisi lingkungan kampung nelayan yang masih belum tertata dengan baik, serta keterbatasan dalam aspek kebersihan, infrastruktur dasar, dan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Situasi ini sejalan dengan temuan (Ngara dkk., 2024), yang mengungkapkan bahwa program bantuan pemerintah di wilayah pesisir sering kali belum mampu menjawab tantangan struktural yang dihadapi komunitas nelayan, termasuk rendahnya kualitas permukiman dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi berkelanjutan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat pesisir belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan struktural yang dihadapi (Titaley & Nurhaeny, 2023). Jika hal ini terus berlanjut, maka visi besar *Blue Economy* sebagai akselerator pembangunan berkelanjutan berisiko tidak dapat terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif terhadap keseluruhan siklus program, mencakup proses perencanaan, implementasi, serta pelaporan dampak dari implementasi Program Kalaju.

Untuk itu, penelitian ini menggunakan *Sustainability Accounting and Reporting (SAR) Framework* yang dikembangkan oleh Schaltegger & Wagner (2006) sebagai pendekatan utama. *Framework* ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap kinerja program berbasis keberlanjutan melalui tiga tahapan: perencanaan (*planning*), pengukuran dan akuntansi kinerja (*accounting*), serta pelaporan (*reporting*). Dengan menggunakan SAR, efektivitas Kalaju tidak

hanya dinilai dari *output* fisik semata, tetapi juga dari bagaimana proses dan hasil implementasi program mampu menghasilkan dampak keberlanjutan yang nyata bagi masyarakat pesisir.

Tanpa adanya pelaporan yang holistik, dampak nyata program akan sulit diukur, dan pengambilan keputusan strategis berbasis bukti menjadi tidak memungkinkan (Adams, 2017; Bebbington & Unerman, 2020). Sistem pelaporan yang gagal mengintegrasikan aspek keberlanjutan cenderung menghasilkan informasi yang tidak relevan dan tidak mampu mendorong perbaikan kebijakan secara progresif (Yuliarti dkk., 2024). Oleh karena itu, adopsi SAR *Framework* menjadi kunci penelitian ini untuk menganalisis dampak program Kalaju secara lebih substansial dan membangun fondasi yang kuat bagi kebijakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan berbasis data.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas aspek pemberdayaan nelayan dan kebijakan pembangunan kawasan pesisir, kajian yang secara khusus menerapkan *Sustainability Accounting and Reporting (SAR) Framework* dalam konteks Program Kalaju masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dengan menyoroti proses pelaporan kinerja program secara holistik, studi ini tidak hanya menganalisis kontribusi Program Kalaju terhadap penguatan ekonomi biru, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas implementasi program di masa mendatang. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari wacana pembangunan, melainkan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kampung-kampung nelayan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Blue Economy

Blue Economy adalah konsep ekonomi yang berfokus untuk mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan (Pauli, 2010). The European Commission mendefinisikan *Blue Economy* sebagai “*all economic activities related to oceans, seas and coasts*” (European Commission, 2018). The World Bank menjelaskan konsep *Blue Economy* sebagai, “*sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods and jobs, and ocean ecosystem and health*”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menjelaskan bahwa konsep *Blue Economy* adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan manajemen dan konservasi laut yang berkelanjutan untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip *community involvement, resource efficiency, minimize waste, dan multiple value added (multiple revenue)* (Mahardianingtyas dkk., 2019). Konsep ini sangat relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara maritim (Latif dkk., 2023).

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menetapkan *blue economy* sebagai program prioritas dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan (KKP, 2020). Dalam implementasinya, Program Kalaju menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota, guna mewujudkan *Blue Economy* serta memperkuat Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola kampung nelayan, program Kalaju diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan, memperkuat ketahanan sektor maritim serta mempercepat pencapaian target implementasi *blue economy* di Indonesia.

Kampung Nelayan Maju (Kalaju)

Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) merupakan bentuk intervensi strategis pemerintah dalam menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat pesisir (KKP, 2022). Program ini didesain sebagai bagian dari upaya membangun kawasan permukiman nelayan yang lebih layak huni, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional berbasis ekonomi biru (*Blue Economy*). Dalam konteks ini, Kalaju tidak hanya diposisikan sebagai program penataan fisik semata, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan komunitas nelayan secara menyeluruh (KKP, 2022).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penataan Kampung Nelayan Maju Tahun Anggaran 2023, kampung nelayan didefinisikan sebagai wilayah permukiman yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, dengan aktivitas utama berupa penangkapan ikan di laut maupun perairan darat. Kampung-kampung ini umumnya tumbuh di sekitar pelabuhan perikanan atau sentra aktivitas kelautan. Namun, pertumbuhannya kerap tidak diimbangi dengan penguatan infrastruktur dasar dan tata ruang yang memadai. Banyak kampung nelayan menghadapi persoalan serius: keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, manajemen limbah yang belum tertata, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan (KKP, 2022b). Kondisi tersebut tidak hanya menciptakan kerentanan ekologis, tetapi juga menghambat potensi ekonomi masyarakat pesisir.

Adapun sasaran utama program adalah kelompok masyarakat nelayan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai petunjuk teknis. Kelompok ini harus berdomisili di kawasan kampung nelayan yang telah ditetapkan oleh KKP dan menunjukkan kesediaan serta kapasitas untuk terlibat aktif dalam kegiatan program. Selain itu, kelompok masyarakat harus memiliki struktur organisasi dan legalitas minimal seperti surat keputusan dari kelurahan atau pemerintah daerah, serta kesiapan dalam mengelola dan memelihara infrastruktur yang dibangun. Sasaran ini

dipilih tidak hanya berdasarkan kebutuhan fisik, tetapi juga atas dasar kesiapan sosial dan komitmen terhadap keberlanjutan.

Untuk mengukur keberhasilan program, dua indikator utama ditetapkan:

- a. Ketersediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur publik yang telah dibangun atau diperbaiki. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah bangunan yang selesai, tetapi dari sejauh mana fasilitas tersebut digunakan dan dirawat oleh masyarakat dalam jangka panjang.
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penataan kampung nelayan. Hal ini mencakup keterlibatan mereka dalam proses musyawarah, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sebagai ukuran keberhasilan dalam membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan.

Mekanisme implementasi Program Kalaju dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan skema Swakelola Tipe IV yang bersifat partisipatif. Dalam skema ini, kelompok masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga bertanggung jawab sebagai pelaksana utama program. Proses pelaksanaan diawasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan pencairan dana yang disesuaikan berdasarkan progres fisik dan pelaporan yang tersusun secara sistematis.

Sustainability Accounting and Reporting (SAR) Framework

Sustainability Accounting atau Akuntansi Keberlanjutan merupakan metode pengelolaan informasi dan akuntansi yang bertujuan menciptakan dan menyediakan informasi berkualitas untuk mendukung pencapaian keberlanjutan sebuah perusahaan. *Sustainability Reporting* atau Pelaporan Keberlanjutan adalah sebuah sarana penyampaian informasi mengenai keberlanjutan perusahaan. Proses akuntansi dan pelaporan saling melengkapi satu sama lain. Pelaporan berguna untuk menyampaikan serta memperkuat informasi yang didapatkan melalui proses akuntansi agar dapat menyampaikan keadaan atau pencapaian keberlanjutan sebuah Perusahaan (Schaltegger & Wagner, 2006). *Sustainability Accounting and Reporting* berfungsi sebagai penghubung penting antara praktik manajemen strategis dan komunikasi upaya keberlanjutan, memastikan bahwa perusahaan dapat secara efektif mengukur dan melaporkan kemajuan mereka dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Data yang disajikan adalah data deskriptif yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai media yang berkaitan dengan tahapan perencanaan, implementasi, dan pelaporan dalam program Kampung Nelayan Maju Oesapa.

Penelitian ini menggunakan *content analysis* guna memperoleh makna yang mendalam (Krippendorff, 2013). Penelitian ini berfokus pada proses implementasi Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) menggunakan SAR *Framework*, yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu: perencanaan (*planning*), implementasi (*accounting*), dan pelaporan (*reporting*) (Schaltegger & Wagner, 2006). Pada tabel 1 disajikan tema dan subtema yang dikembangkan melalui pendekatan *a priori* dan *emerging data*, yang kemudian diterapkan dalam analisis setiap dokumen program Kalaju berbasis SAR *Framework*. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan keberlanjutan secara holistik, guna menilai sejauh mana implementasi program tersebut selaras dengan *Blue Economy*.

Tabel 1. Tema/Subtema perencanaan, implementasi, dan pelaporan Program Kalaju di Kelurahan Oesapa.

Tema	Subtema	Penjelasan Singkat
Perencanaan	Penyusunan kerangka kerja oleh Dinas Perikanan sebagai pendamping dan pengawas	Dinas Perikanan menyusun rencana program Kalaju berdasarkan verifikasi lokal dan target strategis.
	Kelurahan bertindak sebagai Mediator Sosial	Kelurahan menjembatani rencana teknokratik dengan konteks sosial kampung nelayan.
	Pokmas sebagai Perancang Program	Pokmas menyusun proposal, RAB, dan merancang program sesuai kebutuhan lokal.
	Didampingi Dinas Perikanan dan Kelurahan, Pokmas Penetapan Target dan Indikator Keberlanjutan untuk dicantumkan dalam Proposal dari setiap Program yang diusulkan	Indikator SMART disusun untuk mengukur dampak jangka panjang dan sejalan dengan SDGs.
Implementasi	Integrasi Perencanaan ke Sistem Pelaporan	Dokumen rencana harus selaras dengan sistem pelaporan keberlanjutan sejak awal.
	Pelaksanaan Swakelola Tipe IV oleh Pokmas dengan tetap mempertimbangkan Penggunaan Tenaga Kerja dan Material Lokal	Pokmas membentuk tim kerja internal dan melaksanakan program secara partisipatif, dengan mengutamakan penggunaan tenaga

		lokal dan bahan setempat untuk dampak ekonomi dan efisiensi.
	Pendampingan Teknis dan Verifikasi oleh Dinas Perikanan	Dinas Perikanan memverifikasi kesiapan Pokmas, memantau pelaksanaan, dan menjamin akuntabilitas.
	Mediasi Sosial dan Logistik oleh Kelurahan	Kelurahan menangani dinamika sosial dan hambatan administratif selama pelaksanaan.
	Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Lapangan (oleh Tim PokMas)	Kinerja Pokmas diukur terhadap target yang ditetapkan di tahap perencanaan.
Pelaporan	Pelaporan Kinerja oleh Pokmas	Pokmas menyusun laporan fisik, pemanfaatan fasilitas, dan transparansi anggaran.
	Verifikasi dan Laporan Agregat oleh Dinas Perikanan dan Kelurahan	Dinas Perikanan memverifikasi laporan Pokmas dan menyusun laporan agregat untuk pemerintah pusat.
	Pendampingan Pelaporan oleh Kelurahan	Kelurahan memastikan pelaporan inklusif, reflektif, dan diterima masyarakat.
	Evaluasi Dampak dan Outcome-Based Reporting	Pelaporan harus fokus pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, bukan sekadar aktivitas.
	Pelaporan Berkelanjutan yang dipantau selama 2 tahun setelah 1 tahun program berakhir	Hasil pelaporan digunakan untuk evaluasi, perbaikan, dan pembelajaran lintas program.
	Penggunaan fasilitas, pemeliharaan oleh Pokmas secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan dan pendapatan, dengan tetap dipantau oleh Kelurahan.	Hasil program dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat dipantau oleh Kelurahan untuk kesinambungan pertumbuhan pendapatan dan kesejahteraan

Berdasarkan Tabel 1, penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada tema dan subtema yang telah dirumuskan. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing tema dan subtema jelaskan sebagai berikut:

Tema: Perencanaan

- a. Penyusunan Kerangka Kerja oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sebagai pendamping dan pengawas

Dinas Perikanan menyusun rencana program Kalaju berdasarkan kondisi lokal, memastikan rencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan strategis.

b. Kelurahan bertindak sebagai Mediator Sosial

Kelurahan menjadi jembatan antara rencana teknis dari pemerintah dengan kondisi sosial di kampung nelayan, memastikan rencana sesuai dengan budaya dan cara hidup masyarakat setempat.

c. Pokmas sebagai Perancang Program

Kelompok Masyarakat (Pokmas) menyusun proposal dan rencana anggaran berdasarkan kebutuhan dan potensi kampung mereka sendiri.

d. Penetapan Target dan Indikator Keberlanjutan

Pokmas, bersama Dinas Perikanan dan Kelurahan, menetapkan target program yang terukur dan realistis. Target ini dirancang agar berdampak jangka panjang, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

e. Integrasi Perencanaan ke Sistem Pelaporan

Rencana yang disusun sudah harus disiapkan untuk bisa dilaporkan kembali secara terukur. Jadi, sejak awal, perencanaan sudah dirancang agar mudah dipantau dan dilaporkan.

Tema: Implementasi

a. Pelaksanaan Swakelola Tipe IV dengan Tenaga dan Meterial Lokal

Pokmas melaksanakan program sendiri, bukan lewat kontraktor. Mereka membentuk tim kerja dan memakai tenaga kerja serta bahan dari wilayah sendiri agar manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan masyarakat.

b. Pendampingan Teknis dan Verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)

Dinas Perikanan memastikan Pokmas siap menjalankan program, memberi bimbingan teknis, dan memantau pelaksanaan agar sesuai rencana.

c. Mediasi Sosial dan Logistik oleh Kelurahan

Kelurahan menangani konflik internal, membantu kelancaran logistik, dan menjaga hubungan antarwarga selama pelaksanaan program.

d. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Lapangan oleh Pokmas

Pokmas harus mencatat dan melaporkan hasil kegiatan mereka, lalu dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan saat perencanaan.

Tema: Pelaporan

a. Pelaporan Kinerja oleh Pokmas

Pokmas membuat laporan yang menjelaskan hasil fisik program, pemakaian fasilitas, dan bagaimana dana digunakan.

- b. Verifikasi dan Laporan Agregat oleh Dinas Perikanan dan Kelurahan
Dinas Perikanan mengecek laporan Pokmas dan menyusun laporan gabungan ke pemerintah pusat. Kelurahan ikut mendampingi proses ini.
- c. Pendampingan Pelaporan oleh Kelurahan
Kelurahan memastikan bahwa laporan bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban publik.
- d. Evaluasi Dampak dan *Outcome-Based Reporting*
Pelaporan tidak hanya mencatat kegiatan, tapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Pelaporan Berkelanjutan selama Dua Tahun setelah program
Program Kalaju tidak berhenti setelah satu tahun. Dalam dua tahun berikutnya, penggunaannya tetap dipantau untuk memastikan fasilitas tetap bermanfaat.
- f. Pemanfaatan dan Pemeliharaan oleh Pokmas
Pokmas bertanggung jawab menjaga dan memanfaatkan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelurahan ikut memantau agar program benar-benar berkelanjutan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) merupakan salah satu program strategis yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Ekonomi Biru. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penataan Kampung Nelayan Maju Tahun Anggaran 2023, Kalaju diarahkan untuk menciptakan kawasan kampung nelayan yang tertata, bersih, sehat, serta dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan keluarganya.

Pelaksanaan Program Kampung Nelayan Maju berlangsung sejak akhir Juli hingga 28 Oktober 2023, sebagaimana tercantum dalam Kontrak Swakelola Penataan Kampung Nelayan Oesapa. Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, terdapat tiga aktor kunci yang berperan penting dalam keberlangsungan program, yaitu Dinas Perikanan Kota Kupang sebagai pemrakarsa strategis dan fasilitator teknis; Pemerintah Kelurahan Oesapa sebagai mediator sosial yang memastikan keterkaitan dengan konteks lokal; serta Kelompok Masyarakat Oesapa Sejahtera yang berperan sebagai pelaksana swakelola, subjek utama dalam perencanaan partisipatif, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan program.

Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap perencanaan, terdapat lima aktivitas utama yang dianalisis (lihat Tabel 1), yaitu: (1) penyusunan kerangka kerja oleh Dinas Perikanan selaku pendamping dan pengawas; (2) pelibatan Pemerintah Kelurahan sebagai mediator sosial; (3) perancangan proposal program oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas); (4) proses penetapan target dan indikator kinerja yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Kelurahan; serta (5) integrasi target dan indikator tersebut ke dalam sistem pelaporan program, sehingga dapat disampaikan secara terukur dan berkelanjutan.

a. Dinas Perikanan Kota Kupang

Dinas Perikanan Kota Kupang berperan sebagai pemrakarsa strategis sekaligus pelaksana teknis utama di tingkat daerah. Pada tahap perencanaan Program Kalaju, Dinas Perikanan bertanggung jawab untuk memulai proses melalui:

- 1) Sosialisasi program kepada masyarakat nelayan;
- 2) Verifikasi dan validasi calon penerima bantuan berdasarkan kondisi lokal;
- 3) Penyusunan rencana kegiatan penataan kampung nelayan sesuai dengan kebutuhan daerah dan potensi kawasan pesisir.

Peran ini mencerminkan prinsip *business impact assessment* dalam SAR Framework, di mana organisasi perlu menganalisis secara menyeluruh potensi dampak dan risiko sosial, ekonomi, serta lingkungan dari program. Selain itu, Dinas Perikanan juga berperan dalam mengintegrasikan target dan indikator keberlanjutan ke dalam rencana aksi program dengan menggunakan indikator kinerja yang berbasis SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely*).

Berdasarkan temuan di lapangan, Dinas Perikanan telah menjalankan fungsinya dalam melakukan sosialisasi program kepada masyarakat Kampung Nelayan Oesapa serta melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan. Namun, pada tahapan penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mengintegrasikan *business impact assessment* dan penetapan indikator yang berbasis SMART. Hal ini terlihat dari peran Dinas Perikanan yang lebih berfokus pada fasilitasi, pendampingan, dan pengusulan calon penerima bantuan, sementara penyusunan rencana kegiatan diserahkan sepenuhnya kepada kelompok masyarakat. Penyerahan peran tersebut didasari oleh pandangan bahwa Dinas hanya bertugas mendampingi, bukan menyusun langsung rencana program, meskipun idealnya penyusunan rencana tetap melibatkan Dinas untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal dan tujuan strategis program.

b. Kelurahan Oesapa

Pada tahap perencanaan, kelurahan menjadi jembatan antara rencana teknis dari pemerintah dengan kondisi sosial di kampung nelayan, memastikan rencana sesuai dengan budaya dan cara hidup masyarakat setempat. Pemerintah Kelurahan yang adalah Mediator Sosial dan Penjaga Konteks Lokal, berperan penting sebagai jembatan antara perencanaan teknokratik dan konteks sosial kampung nelayan, melalui perannya dalam fungsi perencanaan, yaitu:

- 1) Mendukung pembentukan kelompok masyarakat penerima manfaat;
- 2) Memastikan keterlibatan warga lokal dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan;
- 3) Menyelaraskan rencana kegiatan dengan realitas sosial-spasial kampung, termasuk nilai-nilai budaya lokal dan pola interaksi komunitas.

Dalam SAR Framework, ini mencerminkan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) sebagai unsur penting untuk memastikan bahwa perencanaan program mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mampu menjawab tantangan keberlanjutan secara partisipatif dan deliberatif (Schaltegger & Wagner, 2017). Kelurahan Oesapa telah menjalankan perannya sebagai mediator sosial antara pemerintah dan masyarakat Kampung Nelayan, antara lain melalui dukungan terhadap pengukuhan Pokmas Oesapa Sejahtera dan fasilitasi musyawarah masyarakat. Namun, peran tersebut belum dioptimalkan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan, khususnya dalam hal pendampingan penetapan target dan indikator berbasis *business impact assessment* dan prinsip *SMART indicator*.

c. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Oesapa Sejahtera

Masyarakat (Pokmas) adalah Subjek Utama Perencanaan Partisipatif. Pokmas tidak sekadar menerima bantuan, tetapi berperan aktif sebagai perancang sekaligus pelaksana swakelola Tipe IV. Pada tahap perencanaan, Pokmas berperan dalam:

- 1) Menyusun proposal kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 2) Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memanfaatkan dan memelihara fasilitas bantuan;
- 3) Menyuarakan kebutuhan aktual kampung nelayan dari perspektif warga lokal.

Kehadiran Pokmas di tahap ini merefleksikan pergeseran paradigma dari perencanaan *top-down* ke pendekatan *community-driven development* yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam konteks SAR Framework, peran Pokmas menjadi penting dalam memastikan indikator kinerja yang disepakati bersifat SMART

(*Specific, Measurable, Attainable, Reliable, Time-bound*) (Lodhia dkk., 2022), relevan secara lokal, serta realistis untuk diukur dan dilaporkan secara partisipatif. Pokmas telah menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Namun, aspek keberlanjutan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, belum diintegrasikan secara optimal. Hal ini terlihat dari kondisi fasilitas ikon Kalaju yang mengalami kerusakan akibat kerentanan wilayah pesisir, serta masih terlihatnya pencemaran sampah di kawasan pesisir Oesapa. Kondisi ini mencerminkan pentingnya integrasi aspek keberlanjutan dalam perencanaan strategis guna mendukung keberlangsungan program dan dampaknya dalam jangka panjang. Penetapan target dan indikator kinerja yang berbasis SMART menjadi elemen kunci untuk mencapai hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Muskanan dkk. (2024). Temuan ini juga selaras dengan penelitian (Rumarey Wattimena dkk., 2022) yang menyoroti peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar dapat mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang didapat secara berkelanjutan.

Implementasi (*Accounting*)

a. Dinas Perikanan Kota Kupang

Pada tahap implementasi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota memainkan peran kunci dalam pendampingan teknis dan administrative selama implementasi, yaitu:

- 1) Melakukan verifikasi kesiapan Pokmas sebelum pencairan dana tahap pertama (70%) dan kedua (30%);
- 2) Mendampingi pelaksanaan kegiatan, memberikan asistensi teknis, serta
- 3) Memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan RAB, indikator, dan spesifikasi teknis yang telah disepakati

Selain bertindak sebagai fasilitator, Dinas Perikanan juga menjadi bagian dari mekanisme pengendalian mutu dan penilaian kinerja secara *real time*. Dalam konteks SAR, peran Dinas Perikanan sangat penting dalam memastikan bahwa data yang dilaporkan Pokmas dapat divalidasi dan menjadi dasar pengambilan keputusan lebih lanjut, baik untuk monitoring maupun perencanaan program di masa depan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perikanan telah menjalankan tugasnya dengan melakukan verifikasi kesiapan kelompok masyarakat, yang dibuktikan secara administratif melalui surat pernyataan resmi. Dinas juga bekerja sama dengan penyuluh perikanan dalam melakukan pendampingan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan. Namun, perencanaan sebelumnya belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek keberlanjutan, khususnya melalui pendekatan *business impact*

assessment dan penggunaan indikator kinerja berbasis SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely*).

Hal ini dipengaruhi oleh pengukuran kinerja yang masih berbasis *output*, yaitu berfokus pada realisasi infrastruktur sesuai kontrak swakelola, dan belum berbasis *outcome*. Akibatnya, pelaksanaan program belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian target yang jelas dan terukur. Selain itu, indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya mengikuti prinsip SMART, sehingga proses pengukuran kinerja di tingkat daerah belum mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam terhadap pencapaian program.

b. Kelurahan Oesapa

Pemerintah Kelurahan berperan sebagai penjaga stabilitas sosial dan mediator di lapangan, terutama dalam menangani konflik internal, mendukung kelancaran logistik, dan menjaga hubungan antarwarga selama pelaksanaan program. Peran ini diwujudkan melalui mediasi jika terjadi konflik dalam kelompok masyarakat, dukungan terhadap koordinasi logistik dan penyelesaian hambatan administratif, serta memastikan pelaksanaan program tetap selaras dengan nilai dan struktur sosial lokal. Dalam konteks SAR *Framework*, Kelurahan turut menjaga kesinambungan dan legitimasi sosial program, dengan berperan dalam memastikan pelaksanaan program tidak hanya berjalan efektif secara teknis, tetapi juga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat secara luas.

Dalam pelaksanaannya, Kelurahan Oesapa telah menjalankan perannya dengan memfasilitasi kebutuhan administratif Pokmas Oesapa Sejahtera. Hal ini ditunjukkan melalui dukungan terhadap proses pengukuhan pokmas yang dilakukan melalui rembug masyarakat, penerbitan Surat Keterangan (SK) Lurah, serta berbagai surat pernyataan lain yang dibutuhkan dalam tahap administrasi. Namun demikian, kontribusi kelurahan dalam mengelola dinamika sosial pasca pelaksanaan program masih belum optimal. Hal ini terlihat dari ketiadaan mekanisme kolektif yang mengatur pemeliharaan sarana prasarana bantuan secara berkelanjutan. Saat ini, pemeliharaan fasilitas masih bersifat individual, dilakukan atas inisiatif salah satu anggota pokmas. Kondisi ini berdampak pada keberlanjutan aset program, sebagaimana terlihat pada rusaknya salah satu fasilitas simbolik berupa Ikon Kalaju.

Temuan ini sejalan dengan Ngara dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh kapasitas koordinasi lintas pihak di tingkat lokal. Titaley & Nurhaeny (2023) juga

menekankan bahwa keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada implementasi teknis, tetapi juga pada keberlanjutan kelembagaan dan partisipasi sosial setelah bantuan disalurkan.

c. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Oesapa Sejahtera

Kelompok Masyarakat (Pokmas) berperan sebagai pelaksana kegiatan sekaligus penyusun laporan kinerja sesuai dengan Swakelola Tipe IV. Pokmas seharusnya menjalankan program dengan membentuk tiga tim pelaksana internal: tim persiapan, tim pelaksana teknis, dan tim pengawas, yang berasal dari anggota Pokmas sendiri. Pembentukan struktur ini mencerminkan integrasi fungsi pengendalian internal dan monitoring lapangan secara partisipatif.

Dalam *SAR Framework*, Pokmas memiliki peran penting dalam pengukuran dan pengungkapan kinerja aktual terhadap indikator yang telah disepakati di tahap perencanaan. Mereka harus mengumpulkan bukti progres kegiatan, menyusun laporan kegiatan, serta menyampaikan informasi yang reliabel kepada DKP dan pihak pusat. Proses ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan bentuk akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat) dan vertikal (kepada otoritas).

Dalam pelaksanaan Program Kalaju, Pokmas Oesapa Sejahtera membentuk tim pelaksana berdasarkan jenis bantuan yang diterima serta menunjuk anggota sebagai penanggung jawab masing-masing kegiatan. Ketidakhadiran struktur pengawasan internal ini berimplikasi pada lemahnya *sense of ownership*, yang tercermin dari minimnya upaya pemeliharaan secara kolektif, dimana hingga saat ini masih dijalankan secara individu oleh anggota tertentu saja. Ketika pengawasan tidak dibentuk secara formal dari dalam kelompok, keberlanjutan program menjadi rentan. Temuan ini sejalan dengan Titaley & Nurhaeny (2023), yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan lokal guna menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap hasil program. Penelitian oleh Kaida & Toban (2023) juga menjelaskan bahwa keberhasilan program seperti Kalaju sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM pesisir dalam merespons bantuan, sehingga penguatan kelembagaan lokal menjadi aspek fundamental untuk keberhasilan dan keberlanjutan program ini.

Pelaporan (*Reporting*)

a. Dinas Perikanan Kota Kupang

Dinas Perikanan adalah verifikator, validator, dan pelapor ke Pemerintah Pusat. Dinas Perikanan Kota Kupang memiliki peran ganda dalam tahap pelaporan:

- 1) Pertama, sebagai verifikator teknis atas laporan Pokmas. Dinas Perikanan melakukan pengecekan kelengkapan laporan, validasi progres fisik, serta kelayakan administratif sebagai dasar pelaporan ke tingkat pusat;
- 2) Kedua, sebagai penyusun laporan berkala kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Laporan ini mencerminkan agregasi dari berbagai pelaksanaan Kalaju di wilayah tersebut, termasuk tantangan, capaian indikator, dan potensi replikasi program.

Peran Dinas dalam pelaporan juga mencakup penyusunan umpan balik untuk perencanaan program ke depan, sehingga pelaporan tidak bersifat pasif, tetapi berfungsi sebagai masukan strategis dalam siklus kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan Program Kalaju, Dinas Perikanan Kota Kupang telah menjalankan fungsi fasilitasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Namun, pada tahap pelaporan, pelibatan dinas belum optimal, khususnya dalam hal verifikasi laporan Pokmas sebelum disampaikan ke pemerintah pusat. Berdasarkan hasil, dinas menganggap bahwa tugasnya terbatas pada pendampingan teknis, tanpa kewajiban menyusun laporan tertulis, serta belum sepenuhnya memanfaatkan fungsi pelaporan sebagai alat evaluasi internal. Pelaporan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pendampingan yang telah diberikan kepada Pokmas.

Ketiadaan proses verifikasi di tingkat daerah menyebabkan laporan kinerja Pokmas yang disampaikan ke pusat belum melalui mekanisme kontrol kualitas yang memadai. Hal ini berdampak pada terbatasnya pengungkapan informasi program secara holistik dan berkurangnya peluang untuk memperoleh umpan balik sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan kajian Muskanan dkk. (2024), yang menekankan pentingnya sistem pelaporan yang terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis refleksi sebagai bagian integral dari akuntabilitas publik dan keberlanjutan program pembangunan daerah. Dalam konteks *SAR Framework*, kelemahan pada dimensi *reporting* ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pelaporan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga fungsional dalam mendukung evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi program.

b. Kelurahan Oesapa

Pemerintah Kelurahan berperan sebagai pemantau sosial sekaligus fasilitator keberlanjutan program, meskipun tidak menyusun laporan teknis secara formal. Peran kelurahan menjadi krusial dalam mendampingi proses pelaporan dari sisi sosial dan

kelembagaan, termasuk keterlibatan dalam verifikasi laporan Pokmas bersama Dinas Perikanan serta penyusunan laporan agregat kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini, kelurahan memiliki tanggung jawab untuk:

- 1) Memastikan Pokmas menyampaikan informasi pelaksanaan program secara inklusif dan transparan kepada masyarakat;
- 2) Mendampingi proses refleksi sosial terhadap pelaksanaan program;
- 3) Mendorong keberlanjutan penggunaan fasilitas melalui pengawasan dan fasilitasi skema pembiayaan pemeliharaan jangka panjang.

Dalam perspektif *Sustainability Accounting and Reporting (SAR) Framework*, Kelurahan berperan sebagai penjaga legitimasi sosial atas proses dan hasil pelaporan. Peran ini penting untuk memastikan bahwa pelaporan tidak hanya disampaikan ke tingkat atas secara administratif, tetapi juga disosialisasikan ke masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik yang transparan dan partisipatif.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kelurahan telah menjalankan peran pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, terutama dalam mendukung pemenuhan administrasi Pokmas untuk pengajuan bantuan. Namun, pada tahap pelaporan, keterlibatan kelurahan belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat arahan atau koordinasi khusus terkait peran kelurahan dalam proses pelaporan program. Hal ini berdampak pada belum terbentuknya mekanisme pelaporan yang bersifat holistik dan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka.

Kondisi ini berimplikasi pada belum terbentuknya sistem pelaporan yang menyeluruh dan terbuka bagi masyarakat. Informasi terkait pelaksanaan program, pengelolaan bantuan, dan keberlanjutan fasilitas belum secara rutin didiskusikan di tingkat komunitas. Proses pelaporan yang partisipatif penting untuk membangun akuntabilitas sosial dan memperkuat keberlanjutan program. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muskanan dkk. (2024), yang menekankan pentingnya pelibatan lintas aktor lokal dalam pelaporan, guna memastikan informasi program tersampaikan secara adil dan mencerminkan kondisi lapangan.

c. Kelompok Masyarakat (Pokmas Oesapa Sejahtera)

Dalam kerangka SAR, pelaporan oleh Pokmas harus mencerminkan kontribusi program terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, bukan hanya *output* fisik. Di sinilah pentingnya menyusun laporan berbasis indikator SMART dan berorientasi dampak (*outcome-based reporting*), bukan hanya berbasis *output* (*output-based reporting*). Laporan Pokmas menjadi syarat utama untuk pencairan dana tahap kedua

(30%), namun lebih dari itu, laporan ini menjadi titik awal untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan program menghasilkan *value creation* bagi masyarakat pesisir. Untuk itu, diperlukan peran aktif organisasi pemerintah dalam proses pendampingan sejak tahap perencanaan agar indikator kinerja dapat dirumuskan secara tepat dan diukur secara sistematis sepanjang siklus program.

Dalam implementasinya, Pokmas Oesapa Sejahtera telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah pusat melalui fasilitasi Dinas Perikanan dan penyuluh perikanan. Proses ini dilakukan secara daring tanpa melalui tahap verifikasi laporan di Tingkat daerah. Laporan pemanfaatan yang disusun oleh Pokmas mencantumkan dokumentasi pembangunan fisik dan deskripsi kondisi terkini, namun belum secara utuh menjelaskan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ketiadaan indikator kinerja yang dirancang sejak awal, terutama yang berbasis SMART, menjadi salah satu penyebab tidak terukurnya *outcome* secara sistematis. Misalnya, meskipun aspek penerangan terbukti memberikan dampak signifikan bagi nelayan, laporan tidak menyertakan data atau narasi yang menjelaskan kontribusi tersebut terhadap produktivitas atau keselamatan kerja. Hal ini mencerminkan belum optimalnya aspek pelaporan (Schaltegger & Wagner, 2006), yang seharusnya tidak hanya menekankan pada *output* fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi.

Meskipun laporan program disusun langsung oleh Pokmas sebagai aktor pelaksana di tingkat komunitas, hal ini belum secara otomatis menjamin kualitas pelaporan yang holistik dan akuntabel. Berdasarkan SAR *Framework* (Schaltegger & Wagner, 2006), pelaporan yang efektif seharusnya tidak hanya memuat capaian administratif dan *output* fisik, tetapi juga mencerminkan *outcome* program yang dapat diukur secara jelas. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Muskanan dkk. (2024) yang menegaskan bahwa pelaporan program publik di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan administratif, tanpa mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh. Ketiadaan indikator kinerja yang berbasis SMART serta absennya mekanisme verifikasi lintas pemangku kepentingan menjadi hambatan bagi pencapaian pelaporan yang utuh. Oleh karena itu, agar pelaporan benar-benar mencerminkan kinerja program dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan system pelaporan yang terstruktur, terukur, dan melibatkan berbagai pihak secara partisipatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses perencanaan, implementasi dan pengukuran kinerja, serta pelaporan Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) di Kelurahan Oesapa yang dilaksanakan melalui Dinas Perikanan Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa program ini telah mencerminkan upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam mendukung keberlanjutan dari dampak program ini. Pada tahap perencanaan, keterlibatan pihak-pihak seperti dinas, kelurahan, dan kelompok masyarakat (Pokmas) telah dilakukan, tetapi belum disertai dengan penetapan indikator kinerja berbasis SMART serta belum mengakomodasi potensi lokal dan aspek mitigasi risiko secara sistematis melalui *business impact assessment*.

Indikator umum yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan belum cukup spesifik dan terukur, sehingga belum mampu menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan dan pengukuran kinerja program di tingkat daerah. Namun demikian, pemerintah daerah tetap dapat menyusun perencanaan strategis dengan menetapkan target dan indikator kinerja yang kontekstual dan relevan terhadap kondisi lokal. Hal ini sejalan dengan rekomendasi SAR *Framework* (Schaltegger & Wagner, 2006), yang menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, implementasi dan pengukuran kinerja, serta pelaporan untuk mendukung kinerja program yang berkelanjutan dan holistik.

Tahap pelaporan masih berfokus pada *output* dan disampaikan langsung oleh Pokmas kepada pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme verifikasi di tingkat daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersedianya ketentuan teknis yang secara spesifik mengatur tata kelola pelaporan berbasis keberlanjutan dalam petunjuk teknis program. Sehingga, laporan yang dihasilkan belum sepenuhnya merepresentasikan kinerja dan dampak program secara menyeluruh, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Saran/Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran yang ditujukan untuk mendukung perbaikan implementasi dan pelaporan Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju), khususnya di Kelurahan Oesapa:

a. Bagi Pemerintah Pusat (KKP)

Disarankan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengintegrasikan *Sustainability Accounting and Reporting (SAR) Framework* ke dalam siklus Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju), sebagaimana dijelaskan dalam tema penelitian ini.

- b. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan Kota Kupang & Kelurahan Oesapa)
Penyusunan perencanaan strategis program sebaiknya dilakukan dengan menetapkan indikator dan target kinerja yang selaras dengan kondisi lokal. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan mekanisme verifikasi dan validasi pelaporan di tingkat daerah guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.
- c. Bagi Pokmas Oesapa Sejahtera
Disarankan agar Pokmas meningkatkan kapasitas dalam menyusun perencanaan dan pelaporan program yang tidak hanya berfokus pada realisasi *output* fisik bersama pemerintah daerah, tetapi juga mencakup dampak nyata secara holistik. Pelibatan aktif Pokmas dalam seluruh tahapan program serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk menumbuhkan *sense of ownership* dan mendukung keberlanjutan hasil program.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perikanan Kota Kupang, Kelurahan Oesapa, serta para nelayan di Kelurahan Oesapa atas dukungan dan keterbukaan yang telah diberikan selama proses pengumpulan data. Partisipasi dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak sangat membantu kelancaran dan penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. A. (2017). The sustainable development goals, integrated thinking and the integrated report. International Integrated Reporting Council & Institute of Chartered Accountants of Scotland.
- Bebbington, J., & Unerman, J. (2020). Advancing research into accounting and the UN sustainable development goals. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31, 1657–1670.
- Chandra, Y. A., Rustam, I., & Safitri, P. (2021). Implementasi kebijakan berbasis blue economy dalam kerangka kerjasama pemerintah Indonesia dengan FAO: Studi mengenai unit pengolahan ikan di Kabupaten Lombok Utara. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 1–19.
- European Commission. (2018). What is The Blue Economy? https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/what-blue-economy_en
- Grahadyarini, B. L. (2023, Maret 27). Program 10 kampung nelayan disorot. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/26/program-10-kampung-nelayan-disorot>
- Kaida, J., & Toban, E. T. (2023). Inovasi pendidikan dan pelatihan sumber daya di daerah pesisir. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 6.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). Draft revisi rencana strategis KKP tahun 2020-2024.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021, Oktober 27). Wujudkan ekonomi biru, KKP dorong pengembangan kampung nelayan maju. KKP WEB DJPT. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/wujudkan-ekonomi-biru-kkp-dorong-pengembangan-kampung-nelayan-maju65c1bd666b984.html>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022a). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kampung Nelayan Maju.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022b). Petunjuk teknis bantuan penataan kalaju tahun anggaran 2023.
- Krippendorff, K. (2013). Content analysis: An introduction to its methodology (3rd ed.). Sage.
- Latif, M. F. A., Wafa, S. N., & Siti, A. (2023). Analisis kebijakan blue economy di Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(2), 95–106.
- Lodhia, S., Kaur, A., & Kuruppu, S. C. (2022). The disclosure of sustainable development goals (SDGs) by the top 50 Australian companies: Substantive or symbolic legitimation? *Meditari Accountancy Research*, 31(6), 1578–1605. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2021-1297>
- Mahardianingtyas, S., Safitra, D. A., & Agustio, A. (2019). A blue economy for better economic development: A case study of East Nusa Tenggara, Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 89, 165–173.
- Midlen, A. (2021). What is the blue economy? A spatialised governmentality perspective. *Maritime Studies*, 20(4), 423–448. <https://doi.org/10.1007/s40152-021-00240-3>
- Muskanan, M., Tilt, C., Rao, K., & Whait, R. (2024). Contributing to Indonesia's SDG achievement: Disclosures of regional-owned enterprises. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 37(2), 273–295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2023-0104>
- Nasir, M., & Harun, S. (2024). Optimalisasi blue economy untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir: Studi kasus di Kepulauan Sangkarrang. *Renewable Energy Issues*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/rei.v1i1.8>
- Ngara, P. L. D., Ballo, F. W., & Kiak, N. T. (2024). Implementasi konsep perikanan tangkap dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Oesapa di Kota Kupang. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(6), 1–10. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.962>
- Pauli, G. (2010). The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs.
- Rumarey Wattimena, Z. K., Rustadi, R., & Suadi, S. (2022). Peran dinas perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga nelayan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 51. <https://doi.org/10.22146/jkn.72773>
- Schaltegger, S., & Wagner, M. (2006). Managing sustainability performance measurement and reporting in an integrated manner. In S. Schaltegger, M. Bennett, & R. Burritt (Eds.), *Sustainability accounting and reporting* (pp. 681–697). Springer.
- Schaltegger, S., & Wagner, M. (2017). Managing the business case for sustainability: The integration of social, environmental and economic performance. Routledge.

- Syahputra, A. (2023, November 3). Penataan pemukiman nelayan dalam upaya pengurangan dampak krisis iklim. LCDI. <https://lcdi-indonesia.id/2023/11/03/penataan-pemukiman-nelayan-dalam-upaya-pengurangan-dampak-krisis-iklim/>
- Titaley, S., & Nurhaeny, A. (2023). Efektivitas program pemberdayaan masyarakat bagi kelompok nelayan dalam pengembangan desa pesisir. METIKS, 3(2), 79.
- Yuliarti, E., Sundari, S., & Madein, A. (2024). The potential of integrated reporting to enhance social and environmental (sustainability) in universities. Wahana Riset Akuntansi, 12(2), 125–140. <https://doi.org/10.24036/wra.v12i2.1265>